



**KAJIAN MENGENAI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

Fitri Rahmiyatun¹, Ellyta Muchtar², Rina Lestari³

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer¹, Akademi Manajemen Keuangan²,
Akademi Bahasa Asing³
Bina Sarana Informatika, Tangerang¹, Bina Sarana Informatika, Jakarta Timur²,
Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta³

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 09 Januari 2018
Revisi pertama : 14 Januari 2018
Diterima : 14 Januari 2018
Tersedia online : 23 Januari 2018

Kata Kunci : Kelemahan Pengendalian Intern, Pertumbuhan Ekonomi, Size, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas

Email : fitri.frn@bsi.ac.id¹,
ellyta.ely@bsi.ac.id², rina.rls@bsi.ac.id³

Penelitian ini menggunakan deskriptif untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, size, Pendapatan Asli Daerah dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah kabupaten di Jawa Tengah pada periode 2012-2016. Dengan populasi adalah 7 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sampel penelitian adalah data keuangan 7 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi ganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian: (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; (2) Ukuran pemerintah daerah (size) tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.; (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.; (4) Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kompleksitas tidak berimplikasi pada meningkatnya kelemahan pengendalian intern. Hasil uji t ditolak taraf signifikansi 5%. Kompleksitas tidak berimplikasi pada meningkatnya kelemahan pengendalian intern.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangannya dalam lingkup otonomi daerah. Kewenangan yang besar ini jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik tentu akan menimbulkan potensi kecurangan. Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Menurut riset Petrovits (2010) ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Berdasarkan dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangatlah penting (Martani dan Zaelani, 2011).

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp 9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.990 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp 5,83 triliun. Adapun sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, sebanyak 2.241 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dan sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) senilai Rp 3,88 triliun. Dengan tingginya temuan kasus yang terkait kelemahan pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Fauza, 2015).

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta tanggung jawab kegiatan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari pengendalian intern. Untuk memenuhi keadaan yang terus berubah, perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap sistem pengendalian intern. Cara pimpinan mengetahui kinerja dan efektivitas sistem pengendalian intern melalui evaluasi terpisah dari sistem pengendalian intern.

Esensi penggunaan pengendalian intern dilandasi oleh adanya perbedaan kepemilikan informasi antara *principal* (publik) dan *agent* (pemerintah daerah). Pemerintah daerah sebagai agen memiliki informasi yang lebih baik dari prinsipal sehingga memiliki kecenderungan melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan adanya perbedaan informasi antara *principal* dan *agent*. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*, sehingga *agent* atau Pemerintah Daerah melakukan kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan maka perlu dilaksanakan pengendalian intern Pemerintah Daerah yang baik (Hartono, dkk 2014).

Peranan pengendalian intern sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pasal 56 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk membuat setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia.

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadinya perubahan. Perubahan tersebut khususnya dalam hal ekonomi secara otomatis akan meningkatkan aktivitas bisnis yang terjadi dalam daerah tersebut. Aktifitas ini dapat diukur dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Besarnya angka PDRB suatu daerah akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga bisa mengakibatkan meningkatnya angka kecurangan yang terjadi (Fauza, 2015).

Ditinjau dari *Size* (ukuran) suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Banyaknya *asset* dalam suatu organisasi maka berpotensi terhadap tingginya resiko kecurangan seperti pencurian *asset* atau penyalahgunaan *asset*. Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), luasnya kewenangan yang dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola disisi lain dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara ditinjau dari kompleksitas, semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan (Hartono, dkk, 2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartono, dkk (2013) yang meneliti mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tahun pengamatan dan perbedaan daerah tempat penelitian. Pada penelitian ini meneliti pada daerah di Jawa Tengah tahun 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Kajian Mengenai Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?.
2. Apakah *size* mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?.
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?.
4. Apakah kompleksitas mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui apakah *size* mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui apakah kompleksitas mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat.

Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu institusi untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:319) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan gambaran keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan proses kebijakan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

Kelemahan Pengendalian Intern

Kelemahan Pengendalian Internal Menurut Public Company accounting Oversight Board (PCAOB) dalam Hartono (2014) menyatakan kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan perekonomian berupa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin bertambah dari

tahun-tahun sebelumnya (Martani dan Zaelani, 2011). Menurut Hartono (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal.

Ukuran Pemerintahan

Ukuran pemerintah Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik (Putri dan Mahmud, 2015). Empat ukuran pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal, artinya pemerintah yang besar dan berpendapatan tinggi justru lebih banyak memiliki kelemahan pengendalian internal (Kristanto, 2009).

Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. PAD secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011). Menurut Hartono (2015), PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena PAD (bersumber dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) secara leluasa dikelola oleh daerah, sehingga tidak terdapat kemungkinan penyelewangan pada dana tersebut.

Kompleksitas

Kompleksitas Daerah Istilah “kompleksitas” berasal dari bahasa latin *complexice* yang artinya totalitas atau keseluruhan, yaitu sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi yang mana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kamus Bahasa).

Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Matani dan Zaelani (2011) mencoba mendeskripsikan bagaimana pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas pemerintah daerah

berdasarkan jumlah PAD, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk terhadap kelemahan sistem pengendalian intern di pemerintah daerah. Kelemahan pengendalian intern dalam penelitian ini berdasarkan hasil audit BPK. Sementara hasil penelitian Hartono, dkk (2013) menemukan bahwa pertumbuhan dan *size* berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern, Kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian Fauza (2015) membuktikan bahwa pertumbuhan, ukuran (*size*), pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadinya perubahan. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga bisa mengakibatkan meningkatnya angka kecurangan yang terjadi.

Penelitian Nirmala (2013) menganalisis tentang pengaruh profitabilitas, tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi, dan kontrol kelemahan BUMN internal. Sampel dalam penelitian tersebut adalah perusahaan BUMN yang telah diperiksa oleh BPK periode 2008-2009. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder berupa annual report perusahaan BUMN dari tahun 2008 hingga tahun 2009 dan laporan hasil pemeriksaan BUMN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal memiliki efek 5 profitabilitas secara individual, sedangkan ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan kompleksitas transaksi memiliki efek kelemahan pengendalian internal secara bersamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, *size*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif yang dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2012-2016. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sampel penelitian adalah data keuangan 7 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode tahun 2012-2016. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*.

Definisi operasional variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Pengendalian intern pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa jumlah temuan kasus penyimpangan atau pelanggaran terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Pemerintah Daerah.

Variabel independen antara lain pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak. Pengukuran

pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan rumus perhitungan PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun lalu kemudian dibagi dengan PDRB tahun lalu.

Size, pemerintah suatu daerah dapat menggambarkan besar kecilnya skala pemerintah daerah tersebut. *Size* pemerintah daerah bisa diukur melalui jumlah penduduk yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan. Kompleksitas daerah bisa diukur dengan jumlah kecamatan yang ada disuatu daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data keuangan pada pemerintah daerah tahun 2012-2016. Alat analisis untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut digunakan adalah analisis berganda (*multiple regression*). Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil uji t terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai t_{hitung} diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Artinya pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dan H_1 diterima. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi potensi adanya kelemahan pengendalian intern. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Martani dan Zaelani (2011) membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kelemahan pengendalian intern. Purniasari (2016) juga membuktikan bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kelemahan pengendalian intern.

2. Pengaruh *Size* terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil uji t terhadap ukuran pemerintah daerah (*size*) memperoleh nilai t_{hitung} ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Artinya *size* tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dan H_2 ditolak. Ukuran pemerintah daerah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Konsisten dengan Nirmala dan Daljono (2013) serta Fauza (2015) yang membuktikan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

3. Pengaruh PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil uji t terhadap PAD memperoleh nilai t_{hitung} diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dan H_3 diterima. Semakin tinggi PAD suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi potensi adanya

kelemahan pengendalian intern. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Hartono, dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

4. Pengaruh Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil pengujian hipotesis keempat (kompleksitas) memperoleh nilai t_{hitung} ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Artinya kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dan H_4 ditolak. Tinggi rendahnya kompleksitas suatu pemerintah daerah bukan merupakan faktor yang menentukan adanya kelemahan pengendalian intern. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Nirmala dan Daljono (2013) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka didapatkan pembahasan yang berhubungan dengan hasil pengujian, adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi daerah berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan terhadap pendapatan daerah akan semakin tinggi. Besarnya angka PDRB suatu daerah juga akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga bisa mengakibatkan meningkatnya angka kecurangan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa fokus terhadap pengawasan yang dilakukannya karena begitu banyaknya sekmen-sekmen usaha yang harus mereka awasi.

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan perekonomian berupa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya (Martani dan Zaelani, 2011). Menurut Hartono (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya sudah baik. Pemerintah dalam hal ini berarti telah mampu berjalan sesuai dengan teori keagenan. Aset daerah pada hakikatnya adalah milik masyarakat, sehingga dalam teori keagenan masyarakat adalah *principal*. Pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan terhadap aset secara baik sesuai dengan kehendak rakyat, karena aset yang dimiliki

oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. PAD secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pemasukan bagi daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendapatan asli daerah, namun luasnya kewenangan yang dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyimpangan sehingga hal ini membuat tingginya kelemahan pengendalian intern dalam pemerintah (Utama, 2013).

Kompleksitas diukur dari jumlah kecamatan (SKPD) yang ada dalam suatu pemerintah daerah. Banyak atau sedikitnya SKPD dalam hal ini tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah tersebut. Jumlah SKPD merupakan proksi dalam menjelaskan kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dapat berarti semakin banyak jumlah SKPDnya. Semakin banyak jumlah SKPD semakin banyak informasi yang harus diungkapkan sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan menunjukkan kinerja yang semakin baik. Selain itu, semakin banyaknya jumlah SKPD dalam suatu pemerintahan akan mengakibatkan pemenuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin tinggi. Semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia terkait pengungkapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hasil uji t diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada meningkatnya kelemahan pengendalian intern
2. Ukuran pemerintah daerah (*size*) tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hasil uji t ditolak pada taraf signifikansi 5%. Artinya *size* tidak berimplikasi pada meningkatnya kelemahan pengendalian intern
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hasil uji t diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya tinggi rendahnya PAD berdampak pada kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

4. Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hasil uji t ditolak taraf signifikansi 5%. Kompleksitas tidak berimplikasi pada meningkatnya kelemahan pengendalian intern.

Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya 3 tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.
3. Bagi penelitian mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, seperti jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), besarnya penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, dan kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting End Economics*, 44, 193-223.
- Fahroni Arif Pamuji. 2017. *Pengaruh Size, PAD, Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Y. Tahun 2009-2014)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Univ. Muhammadiyah Surakarta.
- Fauza, Nailatul. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se Sumatera). *Jurnal Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*
- Hartono, Rudi; Amir Mahmud; dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram, Sept 2014*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : IAI
- Kristanto, S. B. "Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal". 2009. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*. Vol. 9. No. 1. ISSN: 1411-691X.
- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh 2011*. 057
- Murwanto, Rahmadi; Ari Budiarto; Ramadhana. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan, Departemen Keuangan RI.
- Nirmala, Swastia dan Daljono. 2013. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Transaksi Terhadap

- Kelemahan Pengendalian Internal. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-9*
- Nirmala, Swastia. (2012). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan pengendalian Intern*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Purniasari, Cici. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014). *Jurnal Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016*
- Putri, Novi Kumala dan A, Mahmud. 2015. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pegendalian Intern PEMDA*”. *Accounting Analysis Journal 4 (2) (2015). ISSN 2252-6765.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun. 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*